

Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Talud untuk Penguatan Infrastruktur Pedesaan

Maeva Nuril Aini¹, Bintis Ti'anatud Diniati², Dwi Rahayu³, Amalia Fauziah Zain⁴, Putri Irawati Ningtias⁵

^{1,2,3,4,5}Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

Email: ¹nurilainimaeva@email.com, ²bintis.t.diniati@email.com, ³dwirahayu42475@email.com,

⁴aliazain05@email.com, ⁵putriira645@email.com

Email Penulis Korespondensi: ¹nurilainimaeva@email.com

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, yang dilaksanakan secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan diawali melalui musyawarah dusun sebagai forum utama dalam menjaring aspirasi warga, khususnya terkait kondisi jalan di lingkungan dan wilayah dusun. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan usulan pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta tingkat kebutuhan yang paling mendesak, bukan didasarkan pada keinginan pribadi. Aspirasi yang telah dihimpun kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa. Menunjukkan bahwa hasil Musrenbangdes menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang memuat skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan desa. Selanjutnya, usulan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui mekanisme tersebut, perencanaan pembangunan jalan di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir dapat berjalan secara terarah, transparan, dan akuntabel, serta mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Infrastruktur

Abstract– This study aims to describe the process of planning road infrastructure development in Tanjung Village, Kalidawir Subdistrict, which is carried out in a participatory manner and oriented toward community needs. The planning process begins with hamlet-level deliberations as the main forum for gathering residents' aspirations, particularly regarding the condition of roads within their neighborhoods and hamlet areas. In this forum, community members put forward development proposals based on actual conditions in the field and the level of urgency, rather than personal preferences. The collected aspirations are then discussed and agreed upon in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) as part of the village development planning stages. The results of the Musrenbangdes serve as the basis for drafting the Village Government Work Plan (RKPDesa), which outlines the development priorities in accordance with community needs and the village's financial capacity. Subsequently, the proposed development activities are adjusted to the available funding sources derived from the Village Budget (APBDesa) and the Regional Budget (APBD). Through this mechanism, the planning of road development in Tanjung Village, Kalidawir Subdistrict, can be implemented in a directed, transparent, and accountable manner, reflecting the village government's efforts to realize equitable and inclusive development for all community members.

Keywords: Development Planning, Community Participation, Infrastructure

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam paradigma pembangunan modern, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi desa. Melalui kerangka kebijakan pembangunan nasional, pemerintah memberikan ruang bagi desa untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal sehingga proses pembangunan menjadi lebih kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Konsep partisipasi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan karena keputusan yang dihasilkan berasal dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, pembangunan desa yang partisipatif menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa di Indonesia, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini merupakan ruang deliberatif yang mempertemukan pemerintah desa, lembaga desa, serta masyarakat untuk merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Melalui Musrenbangdes, berbagai usulan pembangunan dari tingkat dusun dihipung dan dibahas secara bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Musrenbangdes memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa[1]. Namun demikian, implementasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perencanaan, dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya keterlibatan kelompok masyarakat tertentu dalam forum musyawarah[2].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbang. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda et al. menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat berjalan secara efektif apabila pemerintah desa mampu memfasilitasi proses komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat[1]. Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan desa secara signifikan[3]. elain itu, studi yang dilakukan di beberapa desa menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesadaran masyarakat, serta tingkat transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pembangunan[4].

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes secara umum. Kajian yang secara spesifik menganalisis mekanisme perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari tingkat musyawarah dusun hingga tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan masih relatif terbatas. Padahal, proses penjangkaran aspirasi masyarakat pada tingkat dusun merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa program pembangunan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek partisipasi dalam tahap perencanaan, sementara keterkaitan antara proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa masih belum banyak dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian yang menunjukkan bahwa kajian mengenai mekanisme partisipatif dalam pembangunan desa masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya terkait integrasi antara proses musyawarah dusun, Musrenbangdes, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), hingga tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar diimplementasikan dalam praktik pembangunan desa serta bagaimana peran berbagai aktor desa dalam memastikan efektivitas proses pembangunan.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang berbasis partisipasi masyarakat di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir. Fokus penelitian tidak hanya pada tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes, tetapi juga pada proses penjangkaran aspirasi melalui musyawarah dusun, mekanisme pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, serta peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembangunan desa yang partisipatif serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur desa.

Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menempatkan proses perencanaan pembangunan desa sebagai suatu rangkaian mekanisme yang terintegrasi, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan masyarakat di tingkat dusun hingga tahap implementasi pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya melihat partisipasi masyarakat sebagai fenomena dalam forum musyawarah, tetapi juga sebagai proses sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai tata kelola pembangunan desa yang partisipatif serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi program Dana Desa dalam pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau talud sebagai upaya penguatan infrastruktur pedesaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.

Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, yang menjadi salah satu wilayah penerima program pembangunan talud melalui pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini memfokuskan kajian pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembangunan talud.

Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, antara lain kepala desa, anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), perangkat desa, serta masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari pembangunan talud. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur serta proses pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung, seperti dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan kegiatan pembangunan, serta dokumentasi foto pembangunan talud. Data tambahan juga diperoleh dari peraturan pemerintah terkait pengelolaan Dana Desa dan literatur ilmiah yang relevan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan data secara sistematis untuk menggambarkan proses implementasi program Dana Desa serta dampaknya terhadap penguatan infrastruktur desa.

Pendekatan penelitian ini menempatkan pengalaman dan pandangan informan sebagai sumber utama dalam memahami dinamika pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan Dana Desa serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan efektivitas pembangunan infrastruktur pedesaan.

Tabel 1. Data Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Lokasi Pembangunan	Dusun Tanjung RT 03 RW 03
2.	Jenis Kegiatan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) / Talud
3.	Volume Pekerjaan	Panjang 110 m, Lebar 1.3 m, Tinggi 130 cm
4.	Sumber Dana	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
5.	Total Anggaran	Rp85.000.000,00
6.	Waktu Pelaksanaan	23 Januari 2024 – 21 Februari 2024
7.	Persentase Penyelesaian	Selesai 100%

Sumber: Data pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), Diolah 2024

Berdasarkan **Tabel 1**, Pemerintah Desa Tanjung melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa Tembok Penahan Tanah (TPT) atau talud yang berlokasi di Dusun Tanjung RT 03 RW 03. Pembangunan ini memiliki spesifikasi teknis dengan panjang 110 meter, lebar 1,3 meter, dan tinggi 130 sentimeter yang diukur dari bagian pondasi hingga puncak konstruksi. Kegiatan tersebut didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan total anggaran sebesar Rp85.000.000. Proses pembangunan dimulai pada 23 Januari 2024 dan selesai pada 21 Februari 2024 dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan[5].

Pembangunan talud ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta memperbaiki kualitas akses jalan desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan lebar dan berpotensi menghambat mobilitas masyarakat. Setelah pembangunan talud dan proses pengurukan tanah dilakukan, kondisi jalan menjadi lebih stabil dan kapasitas jalan meningkat sehingga dapat digunakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

Keberadaan infrastruktur tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi aktivitas masyarakat, khususnya bagi warga yang bekerja di sektor pertanian[6]. Akses jalan yang lebih baik mempermudah mobilitas dalam distribusi sarana produksi maupun pengangkutan hasil panen. Dengan demikian, pembangunan talud tidak hanya berfungsi sebagai penguat struktur jalan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa[7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Kalidawir merupakan wilayah pedesaan yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian. Aktivitas ekonomi masyarakat desa sebagian besar

bertumpu pada usaha pertanian lahan basah maupun lahan kering, dengan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Mayoritas penduduk menggantungkan mata pencaharian sebagai petani pemilik lahan, buruh tani, serta pelaku usaha pendukung sektor pertanian. Pola ekonomi tersebut menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya infrastruktur jalan desa.

Infrastruktur jalan desa memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan mobilitas masyarakat. Jalan desa berfungsi sebagai akses utama bagi petani untuk menjangkau lahan pertanian, mengangkut sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta mendistribusikan hasil panen ke pasar atau titik pengumpulan. Kondisi jalan yang tidak memadai berpotensi meningkatkan biaya produksi, menghambat distribusi hasil pertanian, serta menurunkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung keberlanjutan perekonomian desa.

Sebelum dilaksanakan pembangunan talud, kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Desa Tanjung masih menghadapi berbagai keterbatasan. Lebar badan jalan relatif sempit, sementara struktur tanah di sisi jalan pada beberapa titik dinilai kurang stabil. Kondisi tersebut diperparah oleh kontur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi pada musim tertentu. Akibatnya, jalan desa rawan mengalami kerusakan, penurunan badan jalan, serta longsor di sisi jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah desa untuk melakukan intervensi pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau talud. Pembangunan talud dipilih sebagai solusi teknis untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan tanah di sekitar badan jalan desa. Talud berfungsi untuk menahan tekanan tanah lateral, mencegah longsor, serta memperkuat struktur jalan agar tetap stabil dan aman digunakan dalam jangka panjang.

Pembangunan talud dilaksanakan di Dusun Tanjung RT 3 RW 3, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tanah cukup tinggi. Secara teknis, pembangunan talud memiliki volume pekerjaan sepanjang kurang lebih 110 meter, dengan lebar konstruksi 1,3 meter dan tinggi sekitar 130 sentimeter yang diukur dari bagian pondasi hingga bagian atas bangunan. Spesifikasi tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi lapangan dan pertimbangan teknis agar talud mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Dari sisi pendanaan, pembangunan talud dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan total anggaran sebesar Rp85.000.000. Pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembangunan dimulai pada tanggal 23 Januari 2024 dan diselesaikan pada tanggal 21 Februari 2024. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, pembangunan talud telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100 persen sesuai dengan rencana yang ditetapkan, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun spesifikasi teknis.

Keberadaan talud yang telah dibangun memberikan dampak signifikan terhadap kondisi jalan desa di lokasi tersebut. Sebelum pembangunan, jalan desa memiliki keterbatasan lebar yang menyulitkan pergerakan kendaraan, terutama kendaraan pengangkut hasil pertanian. Setelah pembangunan talud dan pengurukan tanah dilakukan, kapasitas jalan meningkat, struktur menjadi lebih stabil, serta tingkat keamanan dan kenyamanan pengguna jalan mengalami perbaikan.

3.1 Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Talud

Implementasi program Dana Desa dalam pembangunan talud di Desa Tanjung diawali dari tahap perencanaan yang bersifat partisipatif. Proses perencanaan dimulai melalui musyawarah dusun yang dilaksanakan di Dusun Tanjung dan Dusun Bandil. Dalam forum ini, berbagai unsur masyarakat seperti tokoh tani, pemuda, serta perwakilan lembaga desa menyampaikan usulan pembangunan berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Aspirasi yang disampaikan difokuskan pada permasalahan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Hasil musyawarah dusun kemudian dirangkum oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Usulan pembangunan talud kemudian diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan regulasi.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas seluruh siklus kegiatan pembangunan talud. TPK terdiri dari kepala dusun, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta perwakilan masyarakat desa. Tugas TPK mencakup pengadaan material, pengorganisasian tenaga kerja, pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pengadaan material pembangunan seperti pasir, batu, dan bahan pendukung lainnya diutamakan dari sumber lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga perputaran ekonomi di dalam desa serta mengurangi biaya transportasi. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam pembangunan talud juga dibatasi pada warga desa setempat. Pola

ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara ketat melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun berdasarkan standar Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) kabupaten. Evaluasi progres pekerjaan dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi mingguan untuk menilai volume pekerjaan, kualitas hasil, serta kesesuaian dengan perencanaan teknis. Transparansi dijaga melalui pemasangan papan informasi proyek yang mencantumkan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tujuan utama pembangunan talud adalah untuk menstabilkan lereng atau dinding tanah agar tidak terjadi longsor atau pergeseran tanah yang berpotensi merusak infrastruktur di sekitarnya. Talud juga berfungsi sebagai pengendali erosi tanah, khususnya yang disebabkan oleh aliran air hujan atau limpasan permukaan. Dengan adanya talud, risiko kerusakan tanah dapat diminimalkan sehingga struktur jalan desa tetap terjaga.

Selain fungsi teknis, pembangunan talud memiliki fungsi strategis dalam melindungi infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan usaha tani dan jaringan transportasi desa. Infrastruktur yang terlindungi dengan baik akan mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian serta mobilitas masyarakat desa. Dari perspektif pembangunan ekonomi, talud berkontribusi dalam menjaga akses transportasi tetap terbuka, sehingga aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan secara efisien.

Pembangunan talud juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan desa. Dengan mengendalikan erosi dan pergerakan tanah, talud membantu mencegah degradasi lahan serta kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan talud dapat dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan infrastruktur pedesaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

3.2 Hambatan dalam Implementasi Program Dana Desa

Meskipun pembangunan talud di Desa Tanjung dapat diselesaikan sesuai rencana, pelaksanaan program Dana Desa tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan fisik. Rencana awal pembangunan talud di empat titik harus disesuaikan menjadi dua titik akibat pengalihan anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) minimal 20 persen dari total Dana Desa.[8]

Selain itu, adanya kebijakan apresiasi atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi kapasitas fiskal desa. Pemotongan anggaran yang mencapai hingga 15 persen untuk jaringan jalan desa dan 20 persen untuk ketahanan pangan menyebabkan desa harus melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan lokal desa.[9]

Faktor cuaca juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan talud. Musim hujan menyebabkan risiko longsor material meningkat, sehingga pada beberapa kesempatan pengerjaan harus ditunda demi menjaga keselamatan tenaga kerja dan kualitas konstruksi. Tantangan teknis lainnya meliputi kontinuitas pasokan material dan efisiensi tenaga kerja, yang memerlukan koordinasi intensif antara TPK dan masyarakat desa.

Pengawasan harian yang dilakukan oleh TPK terkadang menghadapi keterbatasan akibat beban kerja aparat desa yang cukup padat. Meskipun demikian, koordinasi kolektif dan pembagian tugas yang jelas mampu meminimalkan dampak hambatan tersebut. Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi mencerminkan kompleksitas implementasi program Dana Desa dalam konteks regulasi yang dinamis dan kebutuhan pembangunan yang beragam[10].

Secara keseluruhan, pembangunan talud di Desa Tanjung merupakan contoh implementasi program Dana Desa yang berorientasi pada penguatan infrastruktur pedesaan. Melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan yang terstruktur, serta pengawasan yang berkelanjutan, pembangunan talud mampu memberikan manfaat fungsional bagi masyarakat desa. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, upaya penyesuaian dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan talud juga menghadapi tantangan administratif yang berkaitan dengan dinamika regulasi pengelolaan Dana Desa. Perubahan kebijakan dan penyesuaian petunjuk teknis dalam satu tahun anggaran menuntut pemerintah desa untuk melakukan revisi dokumen perencanaan secara berulang. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban administrasi, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pemenuhan persyaratan pencairan dana, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas waktu pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan talud. Keterlibatan warga dalam bentuk kontribusi tenaga kerja dan dukungan sosial membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah desa. Pola partisipatif ini juga mendorong terbentuknya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur secara berkelanjutan.

Pembangunan talud di Desa Tanjung dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Penguatan kapasitas perencanaan diperlukan agar alokasi anggaran

dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lapangan. Sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan lokal desa juga perlu ditingkatkan guna memastikan program Dana Desa berjalan secara efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program Dana Desa dalam pembangunan talud di Desa Tanjung menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan yang partisipatif serta pengelolaan program yang transparan dan akuntabel. Proses perencanaan yang dimulai dari musyawarah dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan[11].

Pembangunan talud yang dilaksanakan di Dusun Tanjung RT 03 RW 03 memberikan manfaat nyata dalam memperkuat struktur jalan desa, meningkatkan keamanan akses transportasi, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Perbaikan infrastruktur jalan melalui pembangunan talud juga berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga berdampak positif terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa[12].

Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa, serta faktor cuaca, pemerintah desa mampu melakukan penyesuaian strategi pembangunan melalui prioritas lokasi, optimalisasi sumber daya lokal, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh kapasitas pengelolaan program serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa[10].

Dengan demikian, pembangunan talud di Desa Tanjung dapat menjadi contoh praktik pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal. Penguatan kapasitas perencanaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta konsistensi dalam pengawasan program menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, atas izin, fasilitasi, dan keterbukaan data yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan, serta Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan informasi dan dukungan selama pengumpulan data.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tanjung yang telah bersedia berpartisipasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak akademik dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Seluruh kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENCES

- [1] A. A. Yuda, Mapparenta, Awaluddin, and M. Syahrir, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)," vol. 4, no. 2, pp. 98–107, 2021.
- [2] W. Poespitohadi and F. E. T. Fe, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA," vol. 18, no. 1978, pp. 43–50, 2023.
- [3] S. P. K. Dewi, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKEMBAR KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI," vol. 01, no. 01, 2024.
- [4] F. Naisoko and P. M. Bait, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara," *SEIKAT*, vol. 3, pp. 166–175, 2024, doi: <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1278>.
- [5] D. Peraturan, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024." [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280616/permendesa-pdtt-no-13-tahun-2023>
- [6] P. Y. A. Pane, A. Harahap, and Nursalamah, "Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan

- ekonomi di desa pudun jae kota padangsidimpuan,” vol. 6, no. 2, pp. 407–413, 2026.
- [7] M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development*. Boston: Pearson Education, 2015.
- [8] P. M. Desa, “Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.” [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172373/permendesa-pdtt-no-14-tahun-2021>
- [9] Bappenas, “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Wilayah Pedesaan,” 2019, [Online]. Available: https://www.bappenas.go.id/files/7915/3984/8623/Pembangunan_Infrastruktur_Pedesaan.pdf
- [10] B. Purwanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Infrastruktur Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- [11] K. Desa, “Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Desa.” [Online]. Available: <https://kemendesa.go.id/resources/files/2019/Pedoman-Perencanaan-Pembangunan-Desa.pdf>
- [12] Sutanto, “Infrastruktur Desa dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat,” 2020, [Online]. Available: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpw/article/view/34521>
- [13] K. Bangunjiwo, K. Kasihan, K. Bantul, and D. I. Yogyakarta, “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2024 untuk Pembangunan Talud JUT.” [Online]. Available: <https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first/artikel/4884-Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2024-untuk-Pembangunan-Talud-JUT->